



ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI KECAMATAN SAPARUA TIMUR

Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management on Managerial Performance in East Saparua District

Martha Racwel Patty^{1*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*e-mail Correspondence Author: ataphatty@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 29 September 2024

Direvisi: 9 November 2024

Disetujui: 9 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kinerja manajerial di Kecamatan Saparua Timur. Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis yang diuji yakni (1) Diduga transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial; (2) Diduga akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan diukur menurut tingkat ekplanasinya merupakan penelitian asosiatif. Data diperoleh melalui kuesioner, observasi dan dokumentasi. Sembilan desa di Kecamatan Saparua Timur menjadi sampel dalam penelitian ini, dan responden yang berpartisipasi sebanyak 36 orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan dapat meningkatkan kinerja manajerial di Kecamatan Saparua Timur. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat di gunakan untuk menjadi acuan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial dengan sampel yang jauh lebih besar.

Kata Kunci

Transparansi; Akuntabilitas;
Kinerja Manajerial, Saparua Timur



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Pusat Kajian Ekonomi Kepulauan dan Kemaritiman, FEB Pattimura University. E-ISSN: 3026-4472

PENDAHULUAN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang diterima melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa dan juga dalam pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun kepada masyarakat umum merupakan dasar penilaian kinerja perangkat Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat selama masa jabatannya, juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan perangkat Desa. Oleh karena dalam pengelolaan dana desa harus didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, yang mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Aturan tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan masyarakat.

Dengan demikian, pengukuran kinerja manajerial menjadi relevan untuk menilai sejauh mana perangkat desa mampu menerapkan pedoman ini secara efektif dalam praktik pengelolaan dana desa. Kinerja manajerial adalah salah satu faktor kunci dalam kesuksesan sebuah organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun perusahaan. Menurut (Effendi et al., 2022) secara umum kinerja manajerial diartikan sebagai salah satu faktor penting dalam perusahaan, karena dengan meningkatnya kinerja manajerial diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Mahoney dalam (Warongan, 2019) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai kinerja para individu dalam kegiatan manajerial. Kinerja manajerial terdiri dari delapan dimensi yaitu: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan (supervisi), pengaturan staf (*staffing*) dan (*representatif*). Jadi, kinerja manajerial mencakup berbagai aspek aktivitas manajemen yang harus dijalankan dengan efektif untuk mencapai keberhasilan organisasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Semua proses ini harus didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Sebagai eksekutif di pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada bupati/wali kota, baik berupa laporan semester pertama maupun laporan akhir tahun. Informasi ini juga harus disampaikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses, guna mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua aspek yang saling melengkapi untuk menciptakan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan mengenai informasi maupun proses pelaksanaan atas suatu kegiatan kepada publik, dan ketika publik membutuhkan informasi tersebut, publik dapat dengan mudah mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan, maka dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang, sehingga dana desa yang penggunaanya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat terserap dengan baik (Ridha Fajri; Restu Agusti, 2021).

Sementara itu, akuntabilitas melengkapi transparansi dengan menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya, baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun hasil yang dicapai. Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain (Jatmiko, 2020). Akuntabilitas adalah sebagai prasyarat untuk pemerintahan menjadi lebih baik (Ni Luh Putu Uttari Premananda & Ni Made Yenni Latrini, 2017). Akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan atau pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, tetapi juga mencakup mekanisme untuk memastikan bahwa satu pihak bertanggung jawab kepada pihak lain.

Dengan mengintegrasikan kedua konsep ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa dana desa dikelola secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sering diabaikan. Menurut Mardiasmo dalam (Rahim et al., 2023) "Keterbukaan Pemerintah dalam Membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat." Namun dalam pelaksanaannya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat desa kurang diperhatikan oleh pemerintah desa. Fenomena yang terjadi dikarenakan tidak ada pertanggung jawaban atau keterbukaan

tentang jumlah dana desa yang diterima dari pemerintah pusat dan penggunaannya untuk pembangunan desa tidak secara terbuka disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dana desa kadang menjadi kesempatan bagi pihak berwenang untuk menyalahgunakannya karena tidak terkontrol oleh pegawai, masyarakat dan pemerintah.

Fenomena penyalahgunaan dana desa semakin mengkhawatirkan, khususnya di Provinsi Maluku. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon mencatat 17 kasus korupsi dana desa disidangkan sepanjang Januari hingga November 2019. Jumlah kasus ini meningkat dibandingkan periode awal pemberlakuan dana desa pada tahun 2015 hingga 2018, yang tidak mencapai sepuluh kasus per tahun. Hingga tahun 2024, kasus korupsi dana desa terus meningkat, dengan Kabupaten Maluku Tengah mencatat angka kasus tertinggi (Herin, 2019). Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian lebih mendalam terkait tata kelola dana desa, khususnya di wilayah Maluku Tengah.

Penelitian atau kajian-kajian sebelumnya memberikan fondasi teoritis dan empiris yang mendukung tulisan ini, terutama dalam memahami pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Namun juga kajian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Misalnya, penelitian Jatmiko (2020) yang dilakukan di Kabupaten Sleman dan penelitian yang dilakukan oleh Novatiani et al., (2019) dengan objek penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung Barat. menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi, sementara akuntabilitas menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terarah dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan dana desa, temuan Jatmiko ini relevan untuk menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan tata kelola keuangan desa.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian serupa di wilayah lain tidak selalu menghasilkan temuan yang sama. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Warongan, (2019) di Sulawesi Utara menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah provinsi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Padilah et al (2023) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa sedangkan transparansi dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan konteks regional, seperti struktur pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia, dan tingkat partisipasi masyarakat, yang memengaruhi hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah.

Selain itu, penelitian lain seperti (Purwanti, 2021) juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi dalam memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Menurut Sutrisno, penerapan regulasi yang ketat dapat mencegah potensi penyalahgunaan dana desa dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menjadi langkah strategis dalam mengevaluasi tata kelola dana desa di wilayah Maluku, termasuk Kecamatan Saparua Timur. Pendekatan penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya elemen penting dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah desa. Dalam konteks Kecamatan Saparua Timur, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting mengingat tantangan-tantangan unik yang dihadapi, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan adaptasi terhadap regulasi baru. Penelitian ini berupaya memberikan kebaruan dengan tidak hanya mengevaluasi implementasi best practices, tetapi juga menjawab kesenjangan literatur terkait pengaruh transparansi dan akuntabilitas di wilayah kepulauan, yang selama ini belum banyak dikaji.

Melalui kajian literatur yang mendalam, penelitian ini menggabungkan temuan-temuan empiris dari berbagai penelitian sebelumnya untuk memberikan dasar teoretis yang kuat dalam menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial pemerintah desa di Kecamatan Saparua Timur. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di wilayah kepulauan seperti Maluku.

Lebih lanjut, meskipun penelitian serupa telah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, sebagian besar studi lebih berfokus pada daerah-daerah maju atau pusat pemerintahan. Wilayah-

wilayah dengan karakteristik kepulauan, seperti Provinsi Maluku, masih jarang menjadi fokus penelitian, terutama di Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu kecamatan di wilayah ini, yaitu Kecamatan Saparua Timur, memiliki tantangan yang unik dalam pengelolaan dana desa. Sebagai kecamatan baru hasil pemekaran, Saparua Timur dihadapkan pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan adaptasi terhadap regulasi, yang menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan tata kelola dana desa secara optimal.

Tantangan tersebut semakin diperberat dengan risiko tinggi dalam pengelolaan dana desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Fenomena pejabat pemerintah desa terjerat kasus korupsi mulai marak terjadi di Provinsi Maluku. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon mencatat, sepanjang Januari hingga November 2019, sebanyak 17 perkara korupsi dana desa disidangkan di pengadilan. Menurut juru bicara Pengadilan Negeri Ambon menyampikan sejak dana bergulir pada tahun 2015 hingga 2018 kasus yang ditangani tidak sampai sepuluh per tahun. Peningkatan kasus korupsi dana desa ini masih berlanjut hingga tahun 2024. Kabupaten dengan angka kasus Korupsi tertinggi ada pada kabupaten Maluku Tengah (Herin, 2019).

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah dengan unit analisis pada Kecamatan Saparua Timur. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan baru di Maluku Tengah Provinsi Maluku dan pemekaran dari Kecamatan Saparua. Saparua Timur terdiri dari sepuluh desa yaitu Desa Ulath, Ouw, Sirisori Islam, Sirisori Amalatu, Tuahaha, Mahu, Ihamahu, Nolloth, Itawaka dan Iha. Meskipun kecamatan ini tergolong kecamatan yang masih baru, namun desa-desa pada kecamatan ini juga tak luput dari program dana desa, pemberian dana desa yang cukup besar memerlukan penyesuaian bagi Pemerintah Desa untuk mengelolanya sesuai dengan aturan yang ada. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Saparua Timur sebagai unit analisis yang relevan untuk mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial pemerintah desa.

Penelitian ini memberikan kebaruan dengan fokus pada pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara spesifik terhadap kinerja manajerial pemerintah desa di wilayah kepulauan. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi implementasi *best practices* dalam pengelolaan dana desa tetapi juga mengaitkannya dengan isu korupsi yang menjadi ancaman nyata di daerah tersebut. Perspektif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai efektivitas regulasi dan pentingnya pengawasan masyarakat dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa di wilayah kepulauan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap kinerja manajerial pemerintah desa yang ada di Kecamatan Saparua Timur. 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kinerja manajerial pemerintah desa yang ada di Kecamatan Saparua Timur. Yang nantinya dapat menjadi sumbangsi ilmu kepada pembaca maupun penulis selanjutnya dan menjadi acuan kepada Kecamatan Saparua Timur.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan metode kuantitaif. Menurut Sugiyono (2017) *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antar antar variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan data numerik yang dikumpulkan melalui kuesioner. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara statistik.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah seluruh pegawai yang bekerja di kantor desa yang berada di Kecamatan Saparua Timur yaitu berjumlah 135 orang. 135 orang ini merupakan pegawai yang bekerja pada sembilan desa yang termasuk dalam Kecamatan Saparua Timur, yaitu Desa Ulath, Ouw, Sirisori Islam, Sirisori Amalatu, Tuahaha, Mahu, Ihamahu, Nolloth, Itawaka, dan Iha. Di setiap desa, terdapat beberapa pejabat yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa, seperti Kepala Desa/Raja, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Santri. Masing-masing pejabat ini merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu. Dalam hal ini, sampel yang diambil adalah pejabat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, seperti yang disebutkan sebelumnya: Kepala Desa/Raja, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Santri dari setiap desa yang ada di Kecamatan Saparua Timur. Dengan demikian, sampel yang diteliti adalah individu-individu yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah desa. Jumlah sampel yang diteliti adalah 36 responden, yang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah desa (9 desa) dengan jumlah pejabat yang dipilih sebagai sampel (4 pejabat per desa: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Santri). Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 9 desa x 4 pejabat per desa = 36 responden.

Secara rinci, rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel berdasarkan jumlah desa dan pejabat yang dipilih adalah:

$$\text{Jumlah Sampel} = \text{Jumlah Desa} \times \text{Jumlah Pejabat per Desa}$$

$$\text{Jumlah Sampel} = \text{Jumlah Desa} \times \text{Jumlah Pejabat per Desa}$$

$$\text{Jumlah Sampel} = 9 \times 4 = 36$$

$$\text{Jumlah Sampel} = 9 \times 4 = 36$$

Jadi, berdasarkan teknik *purposive sampling*, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 36 responden yang terdiri dari pejabat yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara kuesioner atau angket yang diajukan kepada responden. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, serta kinerja manajerial pemerintah desa di Kecamatan Saparua Timur. Kuesioner ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur, mencakup aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan kuesioner dilakukan dengan cara memberikan angket kepada pejabat yang menjadi responden yang kemudian diminta untuk mengisi jawaban sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan bagaimana mereka menjalankan tugas mereka dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi lapangan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan faktor lain yang relevan terhadap kinerja manajerial pemerintah desa (Y). Model regresi linier berganda dapat digambarkan dengan persamaan matematis berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

dimana :

Y = Kinerja Manajerial

a = konstanta

b₁, b₂ = koefisien regresi

X₁ = Transparansi

X₂ = Akuntabilitas

e = *error*

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 23. Sebelum menguji hipotesis ada beberapa analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Kualitas Data, dan Uji Asumsi Klasik.

HASIL DAN DISKUSI

Teknik pengolahan data menggunakan *Software IBM SPSS Statistics 23*.

Uji Kualitas Data

- Uji Validitas

Suatu item pernyataan dinyatakan valid jika memenuhi kriteria sig.2-tailed (<0,05).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Item	Sig. (2-tailed)	Ket
X1 :		
X1.1	0,000	Valid
X1.2	0,000	Valid
X1.3	0,000	Valid
X1.4	0,000	Valid
X1.5	0,000	Valid
X2 :		
X2.1	0,000	Valid
X2.2	0,000	Valid
X2.3	0,000	Valid
X2.4	0,000	Valid
X2.5	0,000	Valid
X2.6	0,000	Valid
Y :		
Y.1	0,000	Valid
Y.2	0,000	Valid
Y.3	0,000	Valid
Y.4	0,000	Valid
Y.5	0,000	Valid
Y.6	0,000	Valid
Y.7	0,000	Valid

Sumber: Hasil penelitian, 2024

Dari Tabel 1. dapat dilihat untuk setiap item butir pernyataan dan nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian setiap item indikator instrumen yang dipakai dalam variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2) dan Kinerja Manajerial (Y) adalah valid.

- Hasil Uji Reliabilitas
Suatu instrumen dinyatakan reliabel bila *cronbach alpha* melebihi 0,6 (Sugiyono, 2018: 220).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

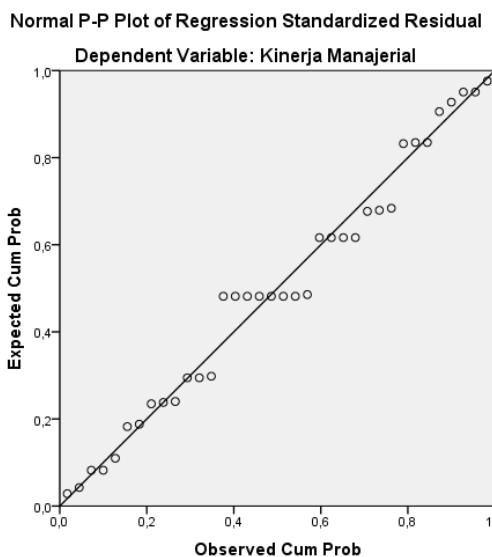
Variabel	Cronbach's Alpha
Transparansi (X1)	0,986
Akuntabilitas (X2)	0,964
Kinerja Manajerial (Y)	0,987

Sumber: Hasil penelitian, 2024

Pada Tabel 2. Dapat diketahui bahwa setiap variabel dalam penelitian ini reliabel dengan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Dimana untuk Variabel transparansi 0,986, variabel Akuntabilitas 0,964 dan variabel Kinerja Manajerial 0,987.

Hasil Uji Asumsi Klasik

- Hasil Uji Normalitas Data
Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, ada dua cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan analisis grafik Normal P-Plot.



Gambar 2. Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran data searah mengikuti garis diagonal tersebut.

➤ Hasil Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Batas nilai *tolerance value* diatas 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

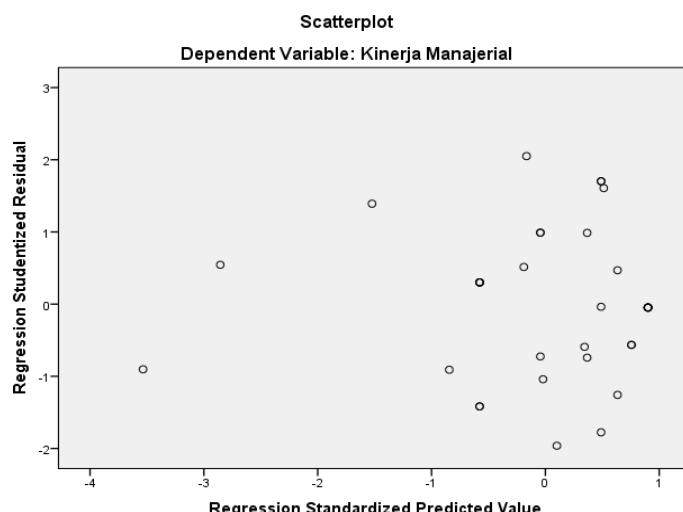
Variabel	Tolerance	VIF
Transparansi (X1)	0,928	1,261
Akuntabilitas (X2)	0,947	1,374

Sumber: Hasil penelitian, 2024

Berdasarkan Tabel 3. Semua variabel independen bebas dari masalah multikolinearitas. Pada variabel Transparansi dan Akuntabilitas memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 .

➤ Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik *scatter plot*, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.



Gambar 3. Grafik Scatterplot

Pada Gambar 3. terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik juga menyebar secara acak, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Manajerial, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk menjawab hipotesis yang dikemukakan melalui analisis berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

	Koefisien	t-hitung	Sig
(Constant)	0,987		
Transparansi	0,592	3,431	0,002
Akuntabilitas	0,707	4,782	0,000

Sumber: Hasil penelitian, 2024

$$Y = 0,987 + 0,592X_1 + 0,707X_2$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta 0,987, menunjukkan bahwa jika variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) tidak mengalami perubahan maka variabel kinerja manajerial mempunyai nilai sebesar 0,987.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel transparansi pengelolaan dana desa (X1) adalah sebesar 0,592. Nilai t-hitung 3,431 nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,690924 dengan nilai signifikansi 0,002, nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut berarti transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (X2) adalah sebesar 0,707. Nilai t-hitung 4,782 nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,690924 dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$). Hasil tersebut berarti akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

R Square	Adjusted R Square
0,986	0,985

Sumber: Hasil penelitian, 2024

Hasil estimasi diperoleh koefisien determinasi yang telah disesuaikan *R-Square* sebesar 0.986 dengan demikian variabel dependen kinerja manajerial dipengaruhi variabel independen transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) sebesar 98,6%. Sedangkan sisanya 1,4% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan dana Desa Terhadap Kinerja Manajerial

Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial perangkat desa di Kecamatan Saparua Timur. Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial berarti bahwa tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa memiliki dampak yang baik dan nyata terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Dengan kata lain, semakin terbuka dan jelas proses pengelolaan dana desa seperti informasi yang dapat diakses oleh masyarakat maka semakin baik pula kinerja manajerial yang ditunjukkan oleh perangkat desa. Pengaruh positif menunjukkan bahwa transparansi membantu meningkatkan efektivitas manajemen, sedangkan pengaruh signifikan menandakan bahwa hubungan ini dapat dibuktikan secara statistik, menunjukkan bahwa pengaruh transparansi tidak terjadi secara kebetulan dan memiliki dampak yang nyata pada kinerja manajerial.

Dengan kata lain, semakin transparan proses dan informasi pengelolaan dana desa dalam organisasi, semakin baik kinerja manajerial yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jika pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan asas transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap pihak yang berkepentingan, baik masyarakat maupun pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, maka kinerja manajerial pemerintah desa yang dihasilkan meningkat.

Hasil uji yang menghubungkan transparansi dengan teori *stewardship* menunjukkan bahwa dalam hubungan antara pemerintah sebagai agen (pimpinan) dan masyarakat sebagai prinsipal (pihak yang dilayani), keduanya perlu menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi. Hal ini mencakup informasi yang mudah dipahami, penyediaan akses informasi yang dipublikasikan, penyusunan laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti. Selain itu, harus ada laporan tahunan mengenai keuangan dan penggunaannya yang harus disertai dengan dokumen dan bukti (Purwanti, 2021).

Hasil temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko, (2020) dimana hasil temuannya menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil yang sama juga oleh penelitian yang dilakukan Novatiani et al., (2019). Dalam penelitian mereka menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan jika transparansi berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Manajerial

Dari hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial perangkat desa di Kecamatan Saparua Timur. Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial berarti bahwa ketika pengelolaan dana desa dilakukan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi seperti akuntabilitas dalam penggunaan dana, tanggung jawab, dan pelaporan yang baik maka kinerja manajerial perangkat desa akan meningkat secara jelas dan bermakna. Pengaruh positif menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik berkontribusi pada peningkatan kinerja manajerial, sedangkan pengaruh signifikan menandakan bahwa hubungan ini dapat dibuktikan secara statistik dan tidak terjadi secara kebetulan. Jadi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen di tingkat desa.

Hasil uji yang mengaitkan akuntabilitas dengan teori *stewardship* menunjukkan bahwa pemerintah sebagai agen (pimpinan) dan masyarakat sebagai prinsipal (pihak yang dilayani) harus memberikan pertanggungjawaban kepada BPD/DPRD. Pertanggungjawaban tersebut mencakup laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dengan melibatkan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan harus ada pengawasan dari tim pelaksana (Khasanah & Marisan, 2022).

Hasil temuan ini didukung dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Murtin & Rahmawati (2023). Dalam penelitian mereka ditemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hasil yang sama juga oleh Padilah et al., (2023) bahwa adanya akuntabilitas, pemerintah desa bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah desa dapat dinilai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial di Kecamatan Saparua Timur. Pertama, transparansi dalam pengelolaan dana desa terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial perangkat desa. Tingginya tingkat transparansi yang mencakup keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat berkontribusi pada peningkatan kinerja manajerial, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas dan efisiensi manajemen desa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kedua, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Peningkatan akuntabilitas melalui tanggung jawab dalam penggunaan dana desa mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat desa, serta memperbaiki kinerja manajerial di tingkat desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel tidak hanya memenuhi kewajiban

administratif, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya tujuan pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M., Fitria, F., & Syahrani, T. (2022). Analisis Kinerja Manajerial Pada Bank Konvensional di Kota Lubuklinggau. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(2), 101–114. <https://doi.org/10.32502/jimn.v1i2.3984>
- Fransiskus Pati Herin. (2019, November 29). *Kasus Korupsi Dana Desa di Maluku Meningkat*. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/29/kasus-korupsi-dana-desa-di-maluku-meningkat>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>
- Murtin, A., & Rahmawati, S. I. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(1), 17–28. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i1.3>
- Ni Luh Putu Uttari Premananda, & Ni Made Yenni Latrini. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2451–2476. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/27160>
- Novatiani, A., Wedi, R., Kusumah, R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–61. <https://ejournal.upi.edu/index.php/mdb/article/view/15983>
- Padilah, P., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kabupaten Bungo). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(3), 180–191. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i3.25152>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 TAHUN 2014, Pub. L. No. 113 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71 (2010). https://peraturan.bpk.go.id/Download/126861/PP Nomor 71 Tahun 2010_satu file.pdf
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/35>
- Rahim, M., Akib, M., Natsir, M., & Mirosea, N. (2023). Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka. *JPEP (Jurnal Progres ...)*, 8(2), 195–204. <https://journal.uho.ac.id/index.php/jpep/article/view/554%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php/jpep/article/download/554/220>
- Ridha Fajri; Restu Agusti, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad Vol.*, 17(2), 209–227. <https://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/14463/0>
- Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Warongan, P. L. N. L. K. J. D. L. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi Dan Pengendalian Akuntansi Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(1), 115–121. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/22312/21996&ved=2ahUKEwjzbrj4teIAxXu4DgGHbKmHYIQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0pHxG56IHTMAAibjCluAiu>